

RENCANA INTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI NUSA TENGGARA BARAT

Oleh :

Ichwan Arif dan Bambang Sunarwan

Abstrak

Pembangunan wilayah untuk kawasan transmigrasi di desain untuk menjadi pusat kegiatan pertumbuhan suatu daerah, kemudian membentuk suatu pola interaksi dengan wilayah dan kawasan sekitarnya, dirancang melalui pendekatan mikro spasial dan makro spasial dalam upaya mewujudkan unit permukiman transmigrasi yang terintegrasi.

Integrasi pengembangan regional pada kawasan transmigrasi pada dasarnya adalah untuk mengembangkan pusat-pusat kegiatan di kawasan transmigrasi sebagai system produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan system permukiman dan system agrobisnis.

Sarana Wilayah, baik itu bandara, jalan, dan sarana lain perlu dipertimbangkan dalam pengembangan transmigrasi termasuk pra sarana yang terdapat di kawasan NTB.

Perumusan pola pemanfaatan ruang kawasan di Provinsi NTB, dilakukan untuk mendapatkan rumusan integrasi kawasan disesuaikan dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang berdasar komoditi unggulan pada masing-masing kawasan.

Kata – kata kunci : *Spasial , stakeholder. tipologi kawasan transmigrasi, integrasi, Pengembangan Regional, teraglomerasi, hierarki, keruangan*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan wilayah dan kawasan transmigrasi di desain untuk menjadi pusat kegiatan pertumbuhan suatu daerah, kemudian membentuk suatu pola interaksi dengan wilayah dan kawasan sekitarnya, karena wilayah permukiman transmigrasi merupakan salah satu bagian wilayah potensial dalam struktur dan pola ruang Provinsi maupun Kabupaten.

Interaksi tersebut meliputi berbagai bidang seperti interaksi fisik maupun non fisik (aspek sosial ekonomi) dengan wilayah/kawasan lainnya. Keterpaduan wilayah transmigrasi yang telah berkembang dengan keterkaitan interaksi tersebut dapat mempercepat pertumbuhan perkembangan kawasan baru yang terintegrasi.

Pembangunan transmigrasi selama ini dirancang melalui pendekatan mikro spasial dan makro spasial dalam upaya mewujudkan unit permukiman transmigrasi yang terintegrasi dengan wilayah sekitarnya. Pendekatan tersebut baru merupakan upaya

mewujudkan interaksi secara fisik keruangan, sehingga walaupun kawasan tersebut pada akhirnya akan tumbuh dan berkembang, namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk mendukung upaya tersebut perlu adanya perencanaan kawasan yang terpadu dengan melibatkan berbagai stakeholder.

Ke depan pembangunan transmigrasi harus dapat mewujudkan kawasan-kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru sesuai kebutuhan pengembangan daerah yang bersangkutan secara berkesinambungan.

Dukungan rencana Integrasi Pengembangan Regional, antara lain :

- 1) Ada sistem hirarki permukiman yang meliputi SP/Desa, SKP atau Desa Utama dan adanya Kota/Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (PPE).
- 2) Ada Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang Terbentuk secara SKP, teraglomerasi dan didukung dengan sistem jaringan jalan untuk mendukung kegiatan ekonomi.
- 3) Adanya suatu kawasan yang mempunyai potensi sumberdaya alam (SDA), Sumberdaya Manusia (SDM) dan Sumberdaya Ekonomi (SDE).
- 4) Adanya kebutuhan lapangan (Need Assesment) yang perlu ditangani secara terpadu dan terencana dengan lintas sektor terkait.
- 5) Adanya kebijakan Daerah (Kabupaten/Provinsi) yang meliputi :
 - a) Arahan pengembangan kegiatan usaha ekonomi, pusat-pusat pertumbuhan yang terintegrasi dengan RTRW/K.
 - b) Arahan pembangunan permukiman transmigrasi yang dapat berperan mendukung pertumbuhan ekonomi maka perlu diupayakan pengembangan komoditas pertanian yang memiliki keunggulan komparatif.

- c) Arahan pembangunan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- d) Adanya kesepakatan bersama diantara Instansi Lintas Sektor yang dikoordinasikan oleh Bupati/Gubernur kemudian disusun Perencanaan Detail guna mendukung pembangunan suatu kawasan.

Secara konsepsi integrasi kawasan merupakan pengembangan lebih lanjut dari penataan ruang terhadap beberapa kawasan pengembangan melalui penentuan sistem fungsi kawasan, dan wilayah fungsional kawasan baik untuk perkotaan dan perdesaan dengan kawasan transmigrasi yang dikategorikan sebagai kawasan permukiman dengan kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan kajian adalah sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi dan mengkaji kawasan-kawasan Transmigrasi yang berpotensi untuk dikembangkan secara terintegrasi beserta pusat-pusat pertumbuhannya dalam wilayah kabupaten.
- 2) Menetapkan deliniasi kawasan transmigrasi terpilih dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonominya.
- 3) Mengkaji rencana struktur pengembangan regional yang telah ada.
- 4) Menyusun rencana pengembangan integrasi regional kawasan transmigrasi.
- 5) Menetapkan tipologi kawasan transmigrasi dan menyusun indikasi program.

1.2.2 Sasaran yang ingin dicapai adalah sbb :

- 1) Tersedianya informasi potensi pengembangan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam wilayah kabupaten.
- 2) Ada deliniasi kawasan transmigrasi terpilih dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonominya.

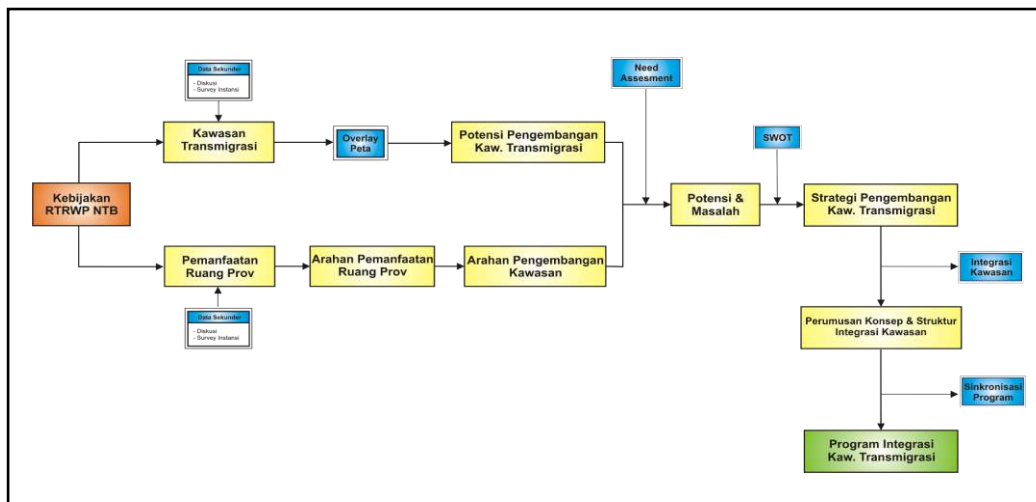
- 3) Teridentifikasinya rencana struktur wilayah pengembangan regional yang telah ada.
- 4) Tersusunnya rencana pengembangan integrasi regional kawasan transmigrasi.
- 5) Teridentifikasinya tipologi kawasan transmigrasi dan tersusunnya indikasi program.

1.3. Kerangka Pemikiran

Interaksi dalam suatu wilayah terjadi karena adanya hubungan saling ketergantungan antar daerah satu dengan daerah lainnya, sebagai akibat hubungan yang saling mempengaruhi antar kegiatan penduduk dengan kegiatan

sosial ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Integrasi pengembangan regional pada kawasan transmigrasi pada dasarnya adalah untuk mengembangkan pusat-pusat kegiatan di kawasan transmigrasi sebagai system produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan system permukiman dan system agrobisnis. Kerangka pemikiran pekerjaan ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pelaksanaan Kajian

2. GAMBARAN UMUM WILAYAH PROVINSI - NTB.

2.1. Letak Geografis dan Administrasi

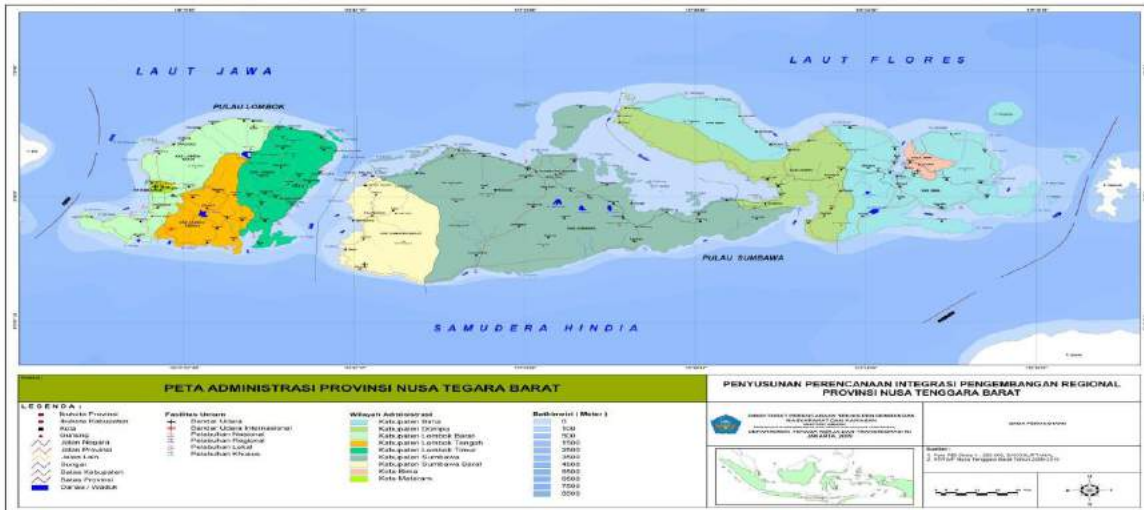
Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki luas wilayah (daratan) 20.153,15 km². Terletak antara 115⁰ 46' – 119⁰ 5' BT dan 8⁰ 10' – 9⁰ 5' LS. (Gambar.2). Memiliki batas wilayah kajian adalah sebagai berikut :

- Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
- Selatan : Samudera Indonesia
- Barat : Selat Lombok / Provinsi Bali

- Timur : Selat Sape / Provinsi NTT

Tabel.1. Luas Daratan dan Perairan Laut Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2008

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (Km2)	Luas Perairan Laut (Km2)	Jumlah	(%)
1	Mataram	61,30	56,80	118,10	0,24
2	Lombok Barat	1.863,40	1.352,49	3.215,89	6,52
3	Lombok Tengah	1.208,40	397,56	1.605,96	3,26
4	Lombok Timur	1.605,55	1.074,33	2.679,88	5,43
5	Sumbawa	6.643,98	4.912,46	11.556,44	23,44
6	Dompu	2.324,60	1.298,17	3.622,77	7,35
7	Bima	4.389,40	3.760,33	8.149,73	16,53
8	Kota Bima	207,50	-	207,50	0,42
9	Sumbawa Barat	1.849,50	-	1.849,02	3,75
	Jumlah	20.153,15	29.159,04	49.312,19	100,00



Sumber : BPN Prov. NTB, Tahun 2008

Gambar 2. Peta Daerah Kajian Nusa Tenggara Barat

2.2 Kondisi Fisik Dasar

2.2.1 Topografi

Ketinggian wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat bervariasi dari 0 meter dari permukaan laut (mdpl), sampai dengan 3.726 mdpl untuk pulau Lombok. Sedangkan untuk Pulau Sumbawa mulai dari 0 - 2.875 mdpl. fisiografi Provinsi Nusa Tenggara Barat diketahui, yaitu datar, landai, bergelombang dan perbukitan.

Di Pulau Lombok terdapat jajaran gunung yakni: dari Gunung Rinjani, Gunung Mareje, Gunung Timanuk, Gunung Nangi, Gunung Perigi, Gunung Plawangan, Gunung Baru. Sedangkan di Pulau Sumbawa terdapat Gunung Batu Lanteh, Gunung Tukan, Gunung Jaran Pusang, Gunung Soromandi/Donggo, Gunung Tambora, Gunung Dadu, Gunung Pajo dan Gunung Sambi.

2.2.2 Lereng

Kemiringan tanah (lereng) di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa wilayah daratan Provinsi Nusa Tenggara Barat paling luas termasuk klasifikasi kemiringan tanah >

30 % seluas 1.168.628,83 Ha (57,98 %), sedangkan paling sempit termasuk klasifikasi kemiringan tanah 0 – 3 % seluas 119.081,20 Ha (5,90 %).

2.2.3 Iklim

Berdasarkan data statistik dari lembaga Meteorologi dan Geofisika, temperatur maksimum pada tahun 2007 berkisar antara 30,6 °C – 32,7 °C, dan temperatur minimum berkisar antara 21,0 °C – 25,0 °C. tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan terendah pada bulan Juli dengan rata-rata kelembaban relatif tinggi, yaitu 75 – 85 persen.

2.2.4 Hidrologi

Hidrologi Provinsi NTB dialiri oleh 1.552 sungai, melintasi Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang dimanfaatkan untuk irigasi, dan keperluan sehari-hari.

2.2.5 Jenis Tanah

Berdasar peta tanah tinjau oleh Lembaga Penelitian Tanah (LPT) Bogor Tahun 1976, maka jenis tanah tinjau yang ada di wilayah provinsi NTB terdiri dari 26 jenis tanah.

Penyebaran jenis tanah di Pulau Lombok menunjukkan bahwa mayoritas adalah jenis tanah Regosol yaitu seluas 251.336 Ha (53,04) yang terdiri dari Regosol kelabu berasal dari endapan pasir, Regosol kelabu dan alluvial hidromorf, Kompleks regosol kelabu dan litosan dari abu vulkanik intermedier.

Kompleks regosol kelabu dan litosan berasal dari abu vulkanik intermedier dan buksi, Regosol coklat dan kelabuan, Regosol coklat dan ke kuning-kuningan, Regosol coklat yang berasal dari endapan pasir, Regosol coklat yang berasal dari abu vulkanik intermedier serta *rown Forest Soil*.

Sedangkan yang paling sedikit adalah alluvial seluas 21.874 Ha (4,62 %) yang terdiri dari tanah alluvial kelabu, alluvial coklat dan tanah alluvial hidromorf.

Sebaran jenis tanah di Pulau Sumbawa menunjukkan bahwa mayoritas adalah Litosol seluas 1.245.716 Ha (80,81 %), tanah Regosol seluas 145.794 Ha (9,46 %), tanah Aluvial seluas 117.815 Ha (7,64 %), dan tanah Grumusol seluas 32.125 Ha (2,08%).

2.2.6 Sistem Lahan

Berdasarkan data yang bersumber dari hasil studi RePPPProT (Regional Physical Planning and Program of Transmigration) skala 1 : 250.000, peta Rupa Bumi Indonesia dari BAKOSURTANAL skala 1 : 50.000, diketahui bahwa di Kawasan Lalundu terdapat 51 Sistem Lahan yaitu RWU, GKA, NBG, TMB, BLO, MBA, IKG, TLB, ALU, APG, ARI, BJJ, BNG, BRT, BUA, DDA, DMO, GBG, GMS, dll.

2.2.7 Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Sumber daya hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi yang masih tinggi, hal ini bisa dilihat dari perspektif luas kawasan, keanekaragaman hayati, jasa lingkungan dan sumbangannya terhadap kehidupan masyarakat secara umum.

Luas APL merupakan luasan terbesar yaitu 980.048,39 Ha (48,60 %), HL seluas 462.021,35 Ha.

2.2.8 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 yang dirinci menurut Kabupaten/Kota mayoritas penggunaannya berupa Hutan Lebat seluas 830.929,47 Ha (41,23 %), paling sempit berupa Rawa seluas 1.688 Ha (0,08 %).

Tabel 4. Luas Penggunaan Lahan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan	896.666,20
2	Hutan Mangrove	9.900,50
3	Perkebunan	107.286,69
4	Pertanian Lahan Basah	15.136,84
5	Pertanian Lahan Kering	5.058,38
6	Sawah	163.991,42
7	Belukar	732.517,13
8	Waduk	4.132,16
9	Tambak	7.202,62
10	Tegalan	73.423,06
Total		2.015.315,00

Sumber: Peta Penggunaan Lahan Prov NTB Tahun 2009

2.3 Kependudukan

Dari hasil sensus jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 sebanyak 4.292.491 jiwa.

Selama kurun waktu 4 tahun (2004 – 2007) rata-rata laju perkembangan penduduk adalah 1,7 % per tahun. Kepadatan penduduk Provinsi NTB tahun 2007 adalah 213 jiwa/km².

Tabel 5. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Di Provinsi NTB Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Mataram	61,30	356.141	427
2	Lombok Barat	1.863,40	796.107	688
3	Lombok Tengah	1.208,40	831.286	658
4	Lombok Timur	1.605,55	1.056.312	5810
5	Sumbawa	6.643,98	406.888	61
6	Dompu	2.324,60	208.867	90

7	Bima	4.389,40	412.504	94
8	Kota Bima	207,50	127.373	614
9	Sumbawa Barat	1.849,02	97.013	52
	Prov. NTB	20.153,15	4.292.491	213

Sumber : NTB Dalam Angka, 2008

2.4 Sosial Budaya

Ditinjau dari sudut sosial budaya, penduduk NTB masih tergolong tradisional yang bersumber pada kebudayaan suku asli masyarakat, yaitu suku Sasak di Pulau Lombok, suku Mbojo di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu serta suku Samawa di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Dua kebudayaan besar yang pernah mempengaruhi perkembangan sejarah di Indonesia yaitu kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam masih berkembang dan berakar pada masyarakat di NTB.

2.5 Sumber Daya Alam

2.5.1 Pertanian Tanaman Pangan,

Pertanian tanaman pangan meliputi padi, jagung, ubi, kacang-kacangan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, secara umum produksi tanaman pangan mengalami peningkatan.

Tabel.6. Luas Panen (Ha) Padi dan Palawija Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kc. Tanah	Kc. Kedelai	Kc. Hijau
1	Mataram	10.716	-	70	-	-	537	851	2
2	Lombok Barat	107.507	8.873	18.107	32.490	3.776	12.898	5.577	716
3	Lombok Tengah	310.216	5.451	9.949	177.32	747	5.964	23.998	1.947
4	Lombok Timur	268.573	6.040	30.905	7092	2.615	1.772	1.131	470
5	Sumbawa	264.441	19.683	30.904	6003	469	2.345	7.374	31.553
6	Dompu	99.134	25.207	5.161	2520	818	1.023	8.306	2.289
7	Bima	192.981	43.090	18.341	11582	4.026	7.192	17.365	1.497
8	Kota Bima	19.253	6.866	2.379	10390	406	1.121	3.087	151
9	Sumbawa Barat	49.195	1.095	4.789	710	150	537	730	2.345
	Prov. NTB	1.410.098	116.251	126.812	98527	13.007	32.913	68.419	48.970

Sumber : NTB Dalam Angka, 2008

2.5.2 Perkebunan

Luas lahan perkebunan yang belum dan sudah dimanfaatkan tahun 2007 adalah seluas 665.314 Ha, antara lain seluas 463.825,48 sudah dimanfaatkan dan seluas 210.883,96 Ha belum dimanfaatkan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8. Potensi Lahan Perkebunan Yang Belum dan Sudah Dimanfaatkan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007

No	Kabupaten/Kota	Belum Dimanfaatkan	Sudah Dimanfaatkan	Total Luas (Ha)	%
1	Mataram	882,84	67,16	950,00	7,07
2	Lombok Barat	39.791,15	53.545,85	93.337,00	57,37
3	Lombok Tengah	62.531,37	34.548,63	97.080,00	35,59
4	Lombok Timur	107.678,60	47.516,40	155.195,00	30,62
5	Sumbawa	146.296,42	21.491,08	167.787,50	12,81
6	Dompu	32.830,80	18.339,95	51.170,75	35,84
7	Bima	46.689,98	20.323,02	67.013,00	30,33
8	Kota Bima	333,57	1.916,43	2.250,00	85,17
9	Sumbawa Barat	26.790,75	3.740,00	30.530,75	12,25
	Prov. NTB	463.825,48	201.488,52	665.314,00	30,28

Sumber : NTB Dalam Angka, 2008

Tabel 2.9. Luas Areal Komoditi Perkebunan Rakyat Menurut Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2007

No	Komoditi Perkebunan	Mataram	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur	Sumbawa	Dompu	Bima	Kota Bima	Sumbawa Barat
1	Kelapa	36,44	22.230,07	16.777,00	15.138,09	5.338,51	2.327,00	3.413,00	740,98	1.118,00
2	Kopi robusta	24,32	2.008,97	1.433,20	1.799,51	4.697,00	1.474,40	1.087,25	4,41	235,00
3	Jambu mete	-	22.735,76	5.056,00	5.118,95	7.671,79	12.522,25	9.529,65	370,19	1.428,00
4	Cengkeh	-	1.207,00	59,00	190,00	-	-	5,00	164,94	-
5	Kakao	-	3.191,26	516,30	941,00	69,13	98,75	39,38	-	87,00
6	Pinang	5,80	161,15	430,60	164,50	21,85	345,90	160,50	16,60	34,00
7	Kapuk	0,60	133,30	954,00	974,95	68,25	451,10	349,75	46,55	136,00
8	Asam	-	46,65	239,20	348,30	65,63	342,00	914,65	250,27	110,00
9	Vanili	-	365,80	78,00	396,75	3,63	6,10	2,98	-	-
10	Lada	-	-	73,00	64,50	-	-	-	-	-
11	Kemiri	-	-	40,00	-	74,55	311,75	2.254,10	55,13	46,00
12	Lontar	-	-	-	118,50	33,25	1,50	-	23,00	-
13	Aren	-	345,00	126,00	400,50	-	-	-	50,00	-
14	Kapas	-	500,00	870,00	100,00	254,00	-	63,00	-	-
15	Tebu	-	-	50,00	64,00	92,30	-	45,00	16,00	46,00
16	Tembakau rakyat	-	105,85	131,10	5.994,75	225,85	151,50	45,70	7,88	-
17	Tembakau Virginia	-	246,30	6.212,05	15.600,35	-	-	-	-	-
18	Wijen	-	-	-	-	71,25	33,00	1.054,00	-	-
19	Tarak	-	268,03	1.461,18	50,00	907,25	166,00	1.190,06	22,05	500,00
20	Empon-empon	-	-	42,00	-	-	108,70	169,00	120,00	-

Sumber : NTB Dalam Angka, 2008

Tabel 2.10. Jumlah Produksi (Ton) Komoditi Perkebunan Rakyat Menurut Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2008.

No	Perkebunan	Mataram	Barat	Tengah	Timur	Sumbawa	Dompu	Bima	Kota Bima	wa
1	Kelapa	13,16	24.164,99	11.745,70	9.437,64	2.973,77	831,19	1.524,99	384,86	626,41
2	Kopi robusta	0,40	1.060,00	413,30	455,15	374,46	503,80	1.059,81	4,41	115,57
3	Jambu mete	-	4.267,00	907,80	1.342,06	1.537,00	4.544,18	542,00	164,94	28,20
4	Cengkeh	-	303,00	3,53	51,82	-	-	2,35	-	-
5	Kakao	-	1.646,00	91,56	27,57	0,30	28,20	1,23	-	87,00
6	Pinang	0,33	227,00	107,70	75,88	4,66	13,75	31,90	7,23	12,97
7	Kapuk	0,12	41,00	246,60	176,57	18,82	92,49	92,05	18,19	32,04
8	Asam	61,15	149,00	43,17	324,60	61,15	207,24	1.579,65	3,58	71,79
9	Vanili	-	74,00	2,23	85,54	0,47	-	-	-	-
10	Lada	-	-	7,00	6,76	-	-	-	-	-
11	Kemiri	-	-	22,45	-	74,55	21,73	2.111,6	0,05	46,00
12	Lontar	-	-	-	8,82	36,60	0,50	-	0,58	-
13	Aren	-	66,00	29,39	255,17	-	-	-	1,25	-
14	Kapas	-	-	40,00	72,50	54,60	-	18,00	-	-
15	Tebu	-	-	379,96	4,71	823,87	-	30,40	7,04	95,00
16	Tembakau rakyat	-	105,85	161,54	2.733,09	216,87	110,64	41,60	15,50	-
17	Tembakau Virginia	-	246,30	6.212,05	15.600,35	-	-	-	-	-
18	Wijen	-	-	-	-	23,70	9,39	408,90	-	-
19	Jarak	-	13,00	95,60	24,90	525,61	65,60	303,00	9,53	64,24
20	Empon-empon	-	-	22,60	-	-	83,10	123,35	62,64	-

Sumber : NTB Dalam Angka, 2008

2.5.3 Peternakan

Untuk dapat meningkatkan konsumsi perkapita protein hewani tersebut diperlukan penyediaan daging yang cukup serta penambahan populasi yang dapat mengimbangi perkembangan penduduk. Di Provinsi NTB pada tahun 2007 populasi kuda tercatat 75.043 ekor, sapi sekitar 515.599 ekor, dan kerbau 153.822 ekor.

2.5.4 Perikanan dan Kelautan

Usaha pemanfaatan sumber daya tersebut masih dalam skala kecil yang dilakukan oleh para nelayan pribumi dengan menggunakan unit penangkapan yang relative tradisional. Produksi hasil penangkapan di laut pada tahun 2007 mencapai 99.553,70 Ton/Tahun, sebanyak 33.907,10 Ton/Tahun berasal dari Lombok Barat dan sebanyak 65.646,60 Ton/Tahun berasal dari Sumbawa. Produksi perikanan laut yang telah dicapai pada tahun 2007 terdiri dari berbagai jenis komoditi diantaranya memiliki beberapa nilai ekonomis penting yang secara potensial banyak tersedia

diperairan NTB, antara lain Rumput Laut sebanyak 75.509 Ton, Mutiara 1,4 Ton, Kerapu 125,8 Ton dan Lobster 19,7 Ton.

2.5.5 Industri

Jumlah perusahaan menurut kelompok industry seperti industri formal dengan jumlah perusahaan sebanyak 7.176 unit, tenaga kerja sebanyak 60.328 jiwa, investasi sebesar 223.765,32 dan produksi sebesar 546.501,56. Sementara industri non formal terdiri dari 72.538 unit perusahaan, tenaga kerja sebanyak 156.860 jiwa, investasi sebesar 100.166,99, produksi sebesar 977.782,43, dan bahan baku penolong sebesar 471.832,20.

2.6 Prasarana Wilayah

2.6.1 Prasarana Perhubungan Darat/Jalan.

Di provinsi NTB, diketahui panjang jalan Negara dan provinsi tahun 2007 mencapai 2.444,16 km, yang terdiri dari jalan Negara 601,83 km dan jalan provinsi 1.842,33 km, dengan kondisi jalan 953,48 km dalam

kondisi baik, 330,59 km kondisi sedang, 456,19 km kondisi rusak ringan, 178,95 km kondisi rusak berat dan 156,20 km tidak terperinci.

2.6.2 Prasarana Perhubungan Laut.

Di Provinsi NTB terdapat 3 buah pelabuhan, yaitu pelabuhan Lembar, Bima dan Badas. Jumlah arus penumpang yang naik dan turun baik dari luar maupun dalam negeri tahun 2007 di pelabuhan Lembar adalah penumpang naik sebanyak 8.061 orang dan penumpang turun sebanyak 7.312 orang, di pelabuhan Bima jumlah penumpang naik sebanyak 19.465 orang dan turun sebanyak 21.676 orang, sedangkan di pelabuhan Badas terdapat 390 orang penumpang naik dan 663 orang penumpang turun.

2.6.3 Prasarana Perhubungan Udara.

Dari ketiga bandar udara yang ada di Provinsi NTB : Selaparang di Mataram, Brang Biji di Sumbawa dan Salahudin di Bima menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan baik dari segi penumpang datang, berangkat maupun transit dan juga barang bongkar muat.

Hal ini terlihat di Bandara Selaparang dengan jumlah pesawat yang datang sebanyak 5.617 pesawat, 5.618 pesawat yang berangkat dengan jumlah penumpang yang dapat sebanyak 447.466 orang dan sebanyak 467.490 orang penumpang yang berangkat.

2.6.4 Listrik.

Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan yang mencapai 638.037.249 juta Kwh. Sementara yang terjual pada tahun 2006 sebesar 501.134.742 juta Kwh meningkat menjadi 566.233.859 juta Kwh pada tahun 2007, walaupun belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebagian besar pembangunan ketenaga - listrik dilayani dan diselenggarakan oleh PT. PLN (Persero). Pihak lain yang turut membiayai kontribusi dalam usaha penyediaan tenaga listrik bagi pengembangan

wilayah NTB adalah KLP Sinar Rinjani, Departemen Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB, LAPAN dan PT. Newmont Nusa Tenggara yang ada pada cabang Mataram, cabang Sumbawa dan Bima. Jumlah pelanggan listrik pada tahun 2007 mencapai 350.182 pelanggan, sementara pada tahun 2006 mencapai 244.719 pelanggan, berarti dari tahun 2006 sampai tahun 2007 ada peningkatan sekitar 5.463 pelanggan.

2.6.5 Air Bersih.

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia untuk keperluan memasak, minum, mandi, mencuci dan lain sebagainya. Penyediaan air bersih di NTB diperoleh dari mata air, sumur bor (artesis), sumur pompa, sumur gali dan pengolahan dari air sungai.

Untuk daerah-daerah perkotaan (ibukota kabupaten dan kecamatan) dan kota-penyediaan air bersih dilakukan melalui sistem perpipaan. Sedangkan untuk daerah pedesaan penyediaan air bersih dilaksanakan melalui pembangunan sumur pompa, sumur gali dan perlindungan terhadap mata air yang ada disekitarnya.

2.6.6 Telepon.

Untuk memperluas jangkauan pelayanan jasa telekomunikasi yang lebih merata, cepat, lancar dan murah maka sejak tahun 2007 secara menerus diusahakan penambahan kapasitas sambungan telepon dan perbaikan sistem jaringan. Total kapasitas untuk tahun 2007 adalah sebanyak 55.080, terisi 50.522.

2.6.7 Drainase.

Drainase disini yang dimaksudkan adalah cepat atau lambatnya air hilang dari permukaan tanah setelah hujan secara alami, dan bukan karena perlakuan manusia. Berdasarkan pengertian tersebut drainase dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu tidak pernah tergenang, tergenang periodik dan tergenang terus menerus. Luas daratan yang tidak pernah tergenang adalah 1.983.215 ha,

tergenang periodik seluas 9.641 Ha dan terus menerus seluas 18.088 Ha.

2.7 Sarana Wilayah

2.7.1 Sarana Pendidikan.

Tahun 2007 di NTB terdapat TK sebanyak 1.033 unit, dengan jumlah murid sebanyak 49.466 siswa dan guru sebanyak 4.483 orang. Jumlah SD sebanyak 83 unit, dengan jumlah murid 548.733 siswa dan guru sebanyak 22.535 orang.

Tabel 2.11 . Banyaknya Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Th .2007

No	Kabupaten/Kota	TK	SD	SLTP	SLTA	SMK	PT
1	Mataram	43	79	34	23	14	18
2	Lombok Barat	85	457	55	26	15	3
3	Lombok Tengah	209	570	75	35	13	5
4	Lombok Timur	169	657	75	47	14	6
5	Sumbawa	141	335	63	20	9	3
6	Dompu	59	207	34	17	7	2
7	Bima	191	392	56	32	5	-
8	Kota Bima	47	147	18	13	7	7
9	Sumbawa Barat	89	79	17	7	3	-
	Prov. NTB	1.033	83	427	220	87	44

Sumber : NTB Dalam Angka, 2008

Tabel 2.12. Banyaknya Guru Dan Murid Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tahun 2007

No	Kabupaten/Kota	TK		SD		SLTP		SLTA		SMK	
		Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru
1	Mataram	2.393	289	16.163	1.425	17.690	719	9.869	394	6.348	366
2	Lombok Barat	3.870	394	94.878	3.353	25.828	740	10.608	408	4.126	113
3	Lombok Tengah	8.814	987	99.453	4.005	26.141	958	13.895	428	2.900	107
4	Lombok Timur	9.516	711	132.149	5.058	31.444	1.100	1.550	480	3.383	149
5	Sumbawa	5.789	534	51.288	2.245	18.475	580	8.774	295	3.195	152
6	Dompu	2.774	221	33.872	1.386	12.686	509	6.974	262	1.662	105
7	Bima	8.242	619	65.099	2.789	23.347	779	13.831	348	1.510	59
8	Kota Bima	3.090	245	12.575	696	6.424	420	6.040	319	3.044	184
9	Sumbawa Barat	4.978	483	43.256	1.578	4.156	224	2.512	114	672	16
	Prov. NTB	49.466	4.483	548.733	22.535	166.191	6.029	88.053	3.048	26.840	1.251

Sumber : NTB Dalam Angka, 2008

2.7.2 Sarana Kesehatan

Rumah sakit yang tersedia di NTB sebanyak 12 unit, terdiri dari 6 unit Rumah Sakit

Umum, 1 unit Rumah Sakit Kusta dan 5 unit Rumah Sakit Bersalin, selain itu juga terdapat 135 unit puskesmas dan 478 unit puskesmas pembantu.

Tabel 2.13. Banyak Rumah Sakit dan Unit Pelayanan Kesehatan Lainnya Th. 2007

No	Kabupaten/Kota	RS			Puskesmas	Pustu
		Umum	Kusta	Bersalin		
1	Mataram	-	-	5	8	17
2	Lombok Barat	1	-	-	19	75
3	Lombok Tengah	1	-	-	22	70
4	Lombok Timur	1	1	-	29	76
5	Sumbawa	1	-	-	17	84
6	Dompu	1	-	-	9	46
7	Bima	1	-	-	20	68
8	Kota Bima	-	-	-	5	25
9	Sumbawa Barat	-	-	-	6	17
	Prov. NTB	6	1	5	135	478

Sumber : NTB Dalam Angka, 2008

Jumlah tenaga kesehatan menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2007 sejumlah 7.383 orang, terdiri dari Dokter Spesialis sebanyak 66 orang, Dokter Umum sebanyak 357 orang, Dokter Gigi sebanyak 115 orang, Tenaga Kesehatan sebanyak 363 orang, Tenaga Paramedis sebanyak 5.279 orang dan Non Paramedis sebanyak 1.203 orang.

2.7.3 Sarana Peribadatan

Jumlah sarana peribadatan di Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2007 adalah sebanyak 5.897 buah, terdiri dari 5.424 buah masjid, 390 buah Pura, 51 buah Gereja dan 32 buah Vihara. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.15 di bawah ini.

Tabel 2.15. Banyaknya Sarana Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007

No	Kabupaten/Kota	Masjid	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Vihara	Pura
1	Mataram	212	9	2	10	131
2	Lombok Barat	1458	0	0	32	200
3	Lombok Tengah	1194	1	0	0	14
4	Lombok Timur	1111	2	1	0	4
5	Sumbawa	471	6	1	0	19
6	Dompu	331	3	1	0	21
7	Bima	349	2	1	0	1
8	Kota Bima	104	3	1	0	3
9	Sumbawa Barat	194	0	0	1	7
	Prov. NTB	5424	26	7	43	400

Sumber : NTB Dalam Angka, 2008

2.7.4 Sarana Pos

Seluruh kecamatan di NTB telah dilayani oleh Kantor Pos. Pelayanan Jasa Pos dan Giro di NTB telah mencapai dan memenuhi sasaran.

Dinilai keberhasilannya meningkatkan pelayanan jasa Pos dan Giro, NTB menduduki urutan ke IV di Indonesia setelah Provinsi Riau, Sumatera Barat dan Bali. Data terakhir mengenai sarana pelayanan Pos dan Giro di NTB terdiri dari 1 buah Pos Besar, 3 buah

Kantor Pos, 67 buah Kantor Pos Pembantu, 37 buah Pos Keliling dan 1 Rumah Pos.

2.8 Pendapatan Regional

PDRB Provinsi NTB ADH yang berlaku pada tahun 2006 mencapai 33,52 triliun, atau mengalami perkembangan sebesar 17,22 persen dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, 37,8 persen disumbang sub sektor pertambangan non migas. Apabila tidak termasuk sub sector pertambangan non migas, PDRB Provinsi NTB tahun 2007 hanya mencapai 21,40 triliun. Peranan tertinggi dalam penciptaan nilai tambah di Provinsi NTB masih ditempati oleh sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian (sektor primer).

Tabel 2.16. PDRB ADH Berlaku di Provinsi NTB

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003 – 2007 Termasuk sub sektor pertambangan non migas (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2003	2004	2005	2006 *)	2007 **)
1	Pertanian	4.728.548 (27,02)	5.172.685 (23,36)	5.815.159 (22,64)	6.505.202 (22,75)	7.181.228 (21,42)
2	Pertambangan & Penggalian	4.709.762 (26,91)	7.970.081 (35,99)	9.288.139 (36,16)	10.104.778 (35,34)	12.669.016 (37,80)
3	Industri Pengolahan	693.476 (3,96)	763.782 (3,45)	868.578 (3,38)	948.804 (3,32)	1.083.503 (3,23)
4	Listrik, Gas & Air Bersih	74.494 (0,43)	84.538 (0,38)	99.111 (0,39)	109.720 (0,38)	126.914 (0,38)
5	Bangunan	1.169.135 (6,68)	1.314.348 (5,94)	1.470.896 (5,73)	1.649.787 (5,77)	1.917.450 (5,72)
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	2.238.683 (12,79)	2.535.987 (11,45)	2.923.359 (11,38)	3.384.598 (11,84)	3.951.540 (11,79)
7	Pengangkutan & Komunikasi	1.316.547 (7,52)	1.457.367 (6,58)	1.994.617 (7,77)	2.236.903 (7,82)	2.456.414 (7,33)
8	Keu, Persew & Jasa Perusahaan	722.394 (4,13)	892.985 (4,03)	998.347 (3,89)	1.141.130 (3,99)	1.315.743 (3,93)
9	Jasa-jasa	1.846.565 (10,55)	1.953.902 (8,82)	2.224.468 (8,66)	2.512.690 (8,79)	2.816.783 (8,40)
	PDRB	17.499.604	22.145.674	25.682.675	28.593.611	33.518.591

Sumber : NTB dalam Angka, 2008

Ket : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

() Persen

2.9 Ketransmigrasian

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat lokasi transmigrasi baik itu yang masih dibina maupun yang sudah diserahkan, tersebar di setiap kabupaten/ Kota kecuali Kab.Banggai Kepulauan dan Kab.Muwali.

UPT di Provinsi NTB terdiri dari 10 PTA (4.799 KK/21.555 Jiwa), 11 PTD (3.558 KK/52.955 Jiwa), 85Desa Sekitar (122.381 KK/477.371 Jiwa).

Program penempatan transmigrasi baru di Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

- 1) Program penempatan transmigrasi baru di Pulau Sumbawa :
 - Baku SP.2 (200 KK), Kab Bima
 - Saripanihi.SP.5(200KK),Kab Bima
 - Rade Dara (200 KK), Kab. Bima
 - Lunyuk (200 KK) Kab.Sumbawa
 - Tongo II SP 2 (262 KK), Kab Sumbawa Barat

- 2) Program penempatan transmigrasi baru di Pulau Lombok :
 - Ds. Sukaraja (100 KK), Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur
 - UPT Jeringo (100 KK), Kab. Lombok Timur

3. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Struktur integrasi kawasan dapat dilakukan dengan perencanaan struktur integrasi kawasan yang mencakup dan perumusan pola pemanfaatan Ruang Kawasan (Gambar 5) terlampir sebagai berikut :

- 1) **Deliniasi Batas Fungsional Kawasan, (Tabel 3.1)** untuk kabupaten yang terdapat kawasan transmigrasi. Dari 9 (Sembilan) kabupaten di Provinsi NTB, ada 6 (enam) kabupaten yang terdapat kawasan transmigrasi, (Gambar 3) terlampir : Kab. Bima, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur dan Kab. Sumbawa Barat. (Tabel 3.1) terlampir.
- 2) **Perumusan Sistem Pusat Permukiman Kawasan; (Tabel 3.2)** didapatkan dari overlay peta struktur ruang wilayah provinsi NTB dengan peta sebaran kawasan transmigrasi provinsi NTB, dimana dapat dilihat sistem pusat permukiman kawasan transmigrasi akan terintegrasi dengan fungsi kota skala provinsi.
- 3) **Perumusan Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan; (Tabel 3.3)** dilakukan untuk mendapatkan rumusan integrasi kawasan disesuaikan dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang dengan komoditi unggulan pada masing-masing kawasan transmigrasi (Gambar 4) terlampir.
- 4) **Perumusan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan,** dimaksudkan agar pemanfaatan ruang

kawasan dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

- 6) Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dapat dilakukan untuk perizinan skala kecil/ individual sesuai peraturan zonasi.
- 7) Penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangan secara bersama.

3.2 Saran

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penerapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaatan ruang membayar pajak lebih tinggi.

Insentif dapat diberikan antarpemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) *“Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Wilayah Propinsi”* Penerbit, PT. Mediatama Saptakarya (PT. MEDISA), Jakarta, 2003.
- 2) *“Rencana Tata Ruang Wilayah Nusa Tenggara Barat, Tahun 2008”*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi NTB, 2008.
- 3) *“Lombok Barat Dalam Angka Tahun 2008”*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat”, 2008.

- 4) "*Lombok Timur Dalam Angka Tahun 2008*". Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur, 2008.
- 5) "*Sumbawa Dalam Angka Tahun 2008*". Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa, 2008.

PENULIS :

- 1) ***Ir. Ichwan Arif, MT.*** pengajar Program Studi Pengembangan Wilayah dan Perkotaan, Fakultas Teknik, Universitas Pakuan Bogor.
- 2) ***Ir. Bambang Sunarwan, MT.*** pengajar Program Studi Teknik Geologi - Fakultas Teknik, Universitas Pakuan Bogor.

LAMPIRAN

Tabel 3.1. Deliniasi Kawasan Transmigrasi

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Keterangan	Jumlah Penduduk (KK)				
1	Kab. Bima	1. Ware Sape	41.250	▪ 1 PTA	▪ 230 KK				
				▪ 3 PTD	▪ 956 KK				
				▪ 24 Desa Sekitar	▪ 18.343 KK				
				▪ Rencana PTB Baku Sp.2	▪ 200 KK				
		2. Waworada	10.000	▪ 3 PTA	▪ 542 KK				
				▪ 13 Desa Sekitar	▪ 11.291 KK				
		3. Tambora Sanggar	24.375	▪ 5 PTA	▪ 1.642 KK				
				▪ 1 PTD	▪ 200 KK				
				▪ 7 Desa Sekitar	▪ 2.634 KK				
				▪ Rencana PTB Saripanihi Sp.5	▪ 200 KK				
				2	Kab. Dompu	4. Hulu	11.250	▪ 2 PTA	▪ 400 KK
								▪ 2 PTD	▪ 395 KK
				▪ 5 Desa Sekitar	▪ 3.691 KK				
		5. Pekat	15.100	▪ 1 PTA	▪				
				3	Kab. Lombok Tengah	6. Silung Blanak	13.125	▪ 1 PTA	▪ 170 KK
								▪ 10 Desa Sekitar	▪ 16.951
4	Kab. Lombok Timur	7. Keruah	11.562	▪ 1 PTA	▪ 200 KK				
				▪ 5 Desa Sekitar	▪ 11.419 KK				
				▪ Rencana PTB Sukaraja	▪ 100 KK				
5	Kab. Sumbawa Barat	8. Lunyuk II	6.900	▪ 1 PTA	▪ 402 KK				
				▪ Rencana PTB Tongo II Sp.2	▪ 262 KK				
						9. Seteluk	11.400	▪ 1 PTA	▪ 180 KK
6	Kab. Sumbawa	10. Lunyuk I	20.600					▪ 1 PTA	▪ 300 KK
								▪ 10 Desa Sekitar	▪ 4.744
				▪ Rencana PTB Lunyuk Sp.2	▪ 200 KK				
						11. Plampang	46.875	▪ 4 PTA	▪ 733 KK
								▪ 5 PTD	▪ 2.007 KK
				▪ 11 Desa Sekitar	▪ 7.632 KK				
				Total			212.437	▪ 20 PTA	▪ 4.799 KK
								▪ 11 PTD	▪ 3.558 KK
				▪ 85 Desa Sekitar	▪ 122.381 KK				
				▪ 5 Rencana PTB	▪ 962 KK				

Sumber : Hasil Analisa, 2009

Tabel 3.2 . Perumusan Sistem Pusat Permukiman Kawasan

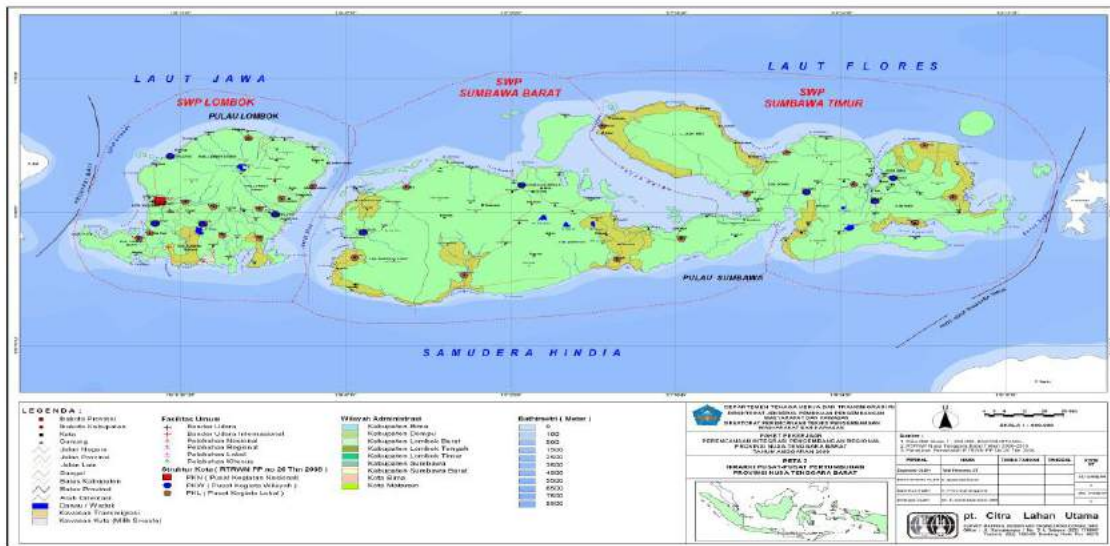
No	Kawasan Transmigrasi	Fungsi Kota
1	Wera Sape	▪ PKL Wera, PKW Bima
2	Waworada	▪ PKW Woha
3	Tambora Sanggar	▪ PKL Kilo, PKW Dompu
4	Hulu	▪ PKW Dompu
5	Silung Blanak	▪ PKL Mujur, PKW Praya, PKW Gerung
6	Pekat	▪ PKW Dompu
7	Keruah	▪ PKL Keruah, PKW Selong
8	Lunyuk II	▪ PKL Jereweh
9	Seteluk	▪ PKW Taliwang
10	Lunyuk I	▪ PKW Sumbawa Besar
11	Plampang	▪ PKW Sumbawa Besar

Sumber : Hasil Analisa, 2009

Tabel 3.3 . Perumusan Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan

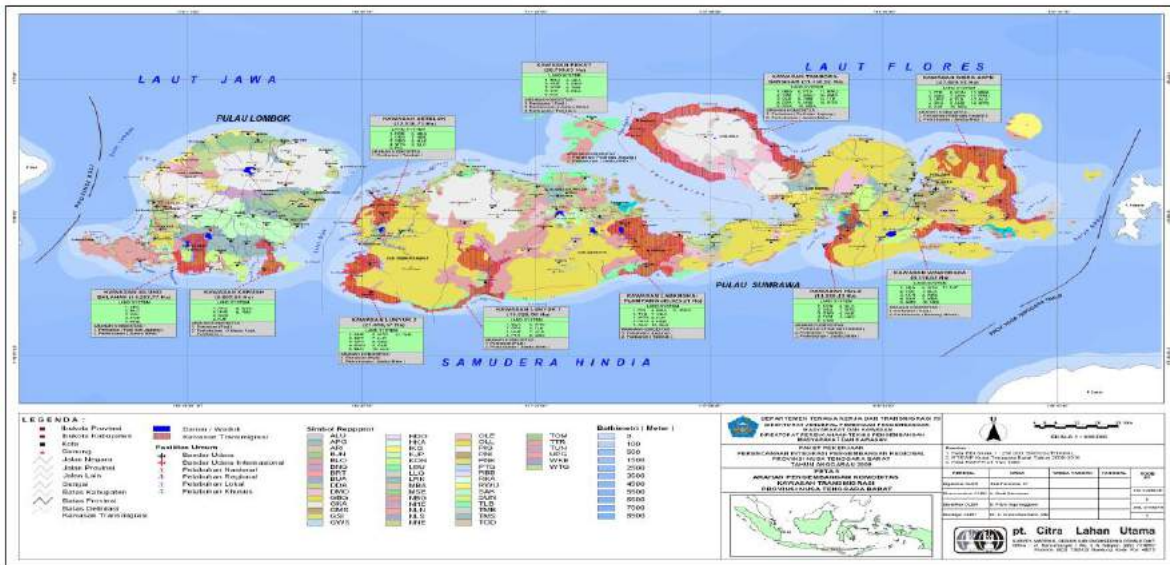
No	Kawasan Transmigrasi	Komoditi Unggulan	Pola Pemanfaatan Ruang	Rumusan Integrasi	Tipologi Kawasan
1	Wera Sape	Kedelai, Jambu Mete, dan Sapi	Tegalan, sawah, perkebunan	▪ Kegiatan persawahan dan perkebunan	▪ Kawasan Andalan Bima & sekitarnya
2	Waworada	Kedelai, Bawang	Sawah, perkebunan, tegalan, permukiman	▪ Kegiatan persawahan, perkebunan dan penyediaan permukiman	▪ Kawasan Andalan Bima & sekitarnya
3	Tambora Sanggar	Kedelai, Jagung dan Jambu Mete	Perkebunan, tegalan	▪ Kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan, pertambakan dan perikanan	▪ Kawasan tertinggal
4	Hulu	Kedelai, Jambu Mete dan Sapi	Tegalan, perkebunan, permukiman,	▪ Kegiatan perkebunan, sawah, pertambakan dan perikanan	▪ Kawasan andalan
5	Pekat		Sawah, tegalan, perkebunan	▪ Kegiatan perkebunan, sawah, pertambakan dan perikanan	▪
6	Silung Blanak	Jagung, Jambu Mete dan Sapi	Sawah, tegalan, perkebunan, pariwisata	▪ Kegiatan perkebunan, dan pariwisata	▪ Kawasan tertinggal
7	Keruah	Jambu Mete dan Kemiri	Sawah, Prekebunan, pariwisata	▪ Kegiatan perkebunan, sawah, permukiman dan pariwisata	▪ Kaw. Andalan Selat Lombok & sekitarnya
8	Lunyak II	Padi, Jagung, Palawija	Perkebunan, Sawah, tegalan,	▪ Kegiatan perkebunan dan sawah	▪ Kaw. Andalan Selat Lombok & sekitarnya
9	Seteluk	Tambak	Sawah, tegalan perkebunan	▪ Kegiatan perkebunan, sawah dan pariwisata	▪ Kaw. Andalan Selat Lombok & sekitarnya
10	Lunyak I	Kedelai, Jambu Mete dan Sapi	Perkebunan, tegalan	▪ Kegiatan perkebunan dan sawah	▪ Kaw. Andalan Sumbawa & sekitarnya
11	Plampang	Jagung, Jambu Mete dan Sapi	Sawah, tegalan, perkebunan, pertambakan	▪ Kegiatan pertanian (padi & jagung), perkebunan, permukiman, perikanan tambak	▪ Kaw. Andalan Sumbawa & sekitarnya

Sumber : Hasil Analisa, 2009



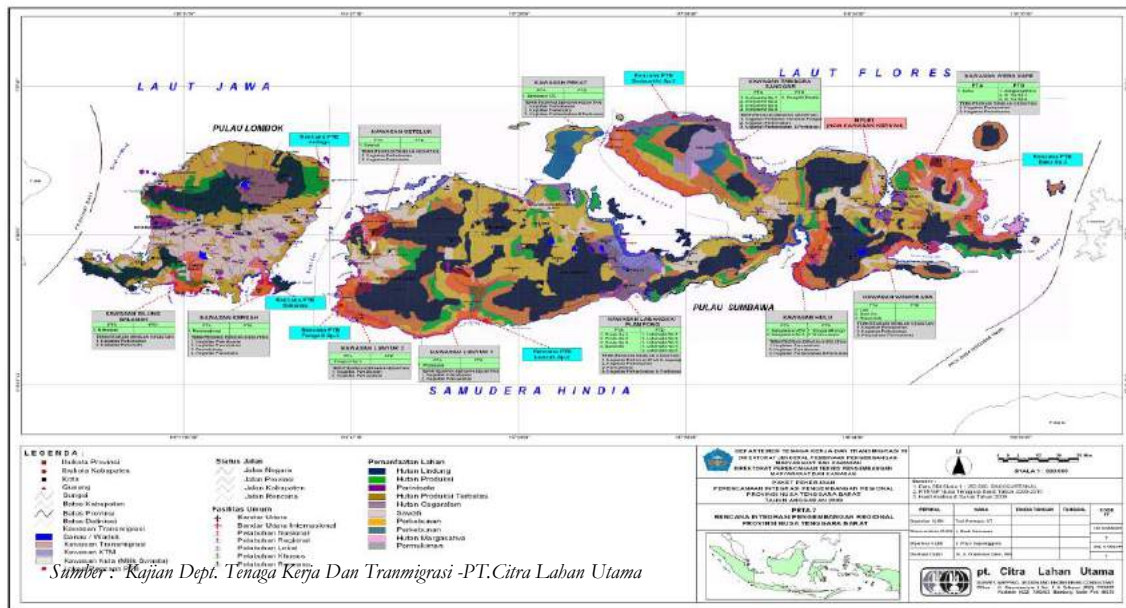
Sumber : Kajian Dept. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi -PT.Citra Laban Utama

Gambar 3. Peta Struktur Ruang dan Peta Sebaran Kawasan Transmigrasi Wil. Prov. NTB



Sumber : Kajian Dept. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi -PT.Citra Lahan Utama

Gambar 4. Peta Arahan Pengembangan Komoditas Kawasan Transmigrasi Wil. Prov. NTB



Sumber : Kajian Dept. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi -PT.Citra Lahan Utama

Gambar 5. Rencana Integrasi Pengembangan Regional Provinsi NTB.